

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA BEJI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



Disusun Oleh :

FRANSISKA ERVINA SERLYANA

2019110216

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat harus menerima Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi operasional perangkat desa dan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan desa. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut temuan penelitian, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat membantu Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Aplikasi Siskeudes, Akuntabilitas dan Transparansi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan angin segar bagi pembangunan daerah di negara kita. Hal ini didukung oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur tentang fungsi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundang-undangan memberikan pedoman dan landasan bagi masyarakat untuk tumbuh menjadi kota yang dinamis dan kompetitif. Agar desa-desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berjalan secara mandiri dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, maka potensinya harus dikembangkan.

Desa, dari bawah ke atas, adalah semacam wilayah mandiri yang mampu mengelola sendiri persoalan domestiknya (Dewanti, 2015:1). Pemerintah desa, yang merupakan tingkatan pemerintahan terendah, bekerja sama erat dengan penduduk setempat dan membantu pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan inisiatif terkait pembangunan lainnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kepala desa dan perangkat desa lainnya harus dapat berhasil melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tiga pilar akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan menjadi sorotan. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus membuat laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang merupakan salah satu

cara pertanggungjawaban dan pengungkapan laporan keuangan desa. . dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk menilai kinerja kepala daerah dan menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan.

Manopo dan Arie (2016) berpendapat bahwa peningkatan kepercayaan publik dalam operasi pemerintah dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, desa harus menerapkan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan desa masih berada di urutan terbawah dalam hal realisme, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang akan meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan adalah fenomena yang merugikan kemampuan sektor publik Indonesia untuk berkembang (Risnaningsih et al., 2018). Mengadopsi paradigma otonomi berdampak pada perlunya memperhatikan akuntabilitas publik dan transparansi dalam politik dan administrasi, khususnya di sektor keuangan. Hal ini terkait dengan perkembangan pemerintahan desa yang menekankan pada tata kedaerahan dalam pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa merupakan faktor dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur daerah masih banyak kekurangan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Ismail et al., 2016). Mengingat ketidakmampuan aparatur desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka sangat mungkin terjadi kesalahan baik administratif maupun substantif dalam pengelolaan uang desa yang dapat berujung pada permasalahan hukum (BPKP 2015).

Risnainingsih (2017) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen yang berurusan dengan alokasi aset yang adil di berbagai sarana investasi serta upaya menghasilkan uang untuk investasi atau biaya yang masuk akal secara ekonomi. Inisiatif yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan, penganggaran, pengelolaan pemerintahan desa, dan pelaporan keuangan adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama dari sektor publik adalah pemenuhan akuntabilitas. Akuntabilitas sering dilihat sebagai tanggung jawab pengelola kepercayaan publik (pemerintah), yang bertugas menginformasikan publik tentang seberapa baik kinerja pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan akuntabilitas melalui laporan pelaksanaan rutin.

Melalui kegiatan evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Desa telah berhasil memenuhi maksud dan tujuannya melayani masyarakat (Moedarlis, 2016). : 126). Karena kegiatan tersebut termasuk harapan dan keinginan masyarakat, masyarakat secara keseluruhan berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan berjalan dan juga perlu mengetahui siapa yang bertugas merencanakan atau melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Halim: 126).

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya bernama SIMDA dikembangkan pada tahun 2015 sebagai hasil kerjasama antara pemerintah pusat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mempermudah

perangkat desa untuk mengatur dan mengungkapkan keuangan mereka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat.

Pengamatan menunjukkan bahwa perangkat lunak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk Desa Beji. Strategi ini dapat membantu pemerintah desa membuat laporan keuangan dengan lebih mudah. Pemerintah Desa memiliki banyak tanggung jawab karena kedudukannya yang penting. Akibatnya, sistem informasi dan komunikasi desa membantu masyarakat mengelola keuangan desa, sehingga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana sistem keuangan desa digunakan.

Diharapkan dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang sehat, pemerintah desa akan lebih mampu mengelola operasionalnya secara mandiri, mencapai hasil yang diinginkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian implementasi Sistem Keuangan karena harus diterapkan di desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

“EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA”.

1.2 Rumusan Masalah

Isu-isu di bawah ini dapat diangkat berdasarkan fakta-fakta di atas: Seberapa baik penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) oleh Beji dalam meningkatkan akurasi dan keterbukaan laporan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti harus mencapai tujuan berikut untuk memenuhi gambaran masalah penelitian: Seberapa besar peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan Desa Beji akibat penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes)?

1.4 Paradigma Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2012), paradigma adalah pola atau model yang menggambarkan bagaimana sesuatu dibangun (komponen dan hubungannya) atau bagaimana potongan-potongan itu berfungsi (aktivitas yang memiliki konteks atau dimensi temporal tertentu). Sebaliknya, paradigma, menurut Kasiram (2008: 173), adalah kerangka studi yang fleksibel yang berfungsi sebagai seperangkat praduga, penegasan, aksioma, postulat, atau gagasan. Paradigma ilmiah dan paradigma alam adalah dua paradigma yang sering digunakan dalam kajian ilmiah. Harmon (Maleong: 2012:49) mendefinisikan paradigma sebagai model dasar persepsi, pemikiran, penilaian, dan tindakan sehubungan dengan aspek realitas tertentu.

Paradigma penelitian merupakan landasan bagi peneliti untuk membentuk kerangka berpikirnya saat melakukan penelitian pada topik penelitiannya, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pengetahuan tentang paradigma penelitian yang telah dikemukakan di atas. Pemanfaatan gagasan teoritis, metodologi, metode,

prosedur, dan tahapan analisis inilah yang kemudian akan diarahkan oleh penelitian agar berkelanjutan.

Peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif berbasis konstruktivisme dalam kajiannya, menurut Meleong (2012: 50–51). Paradigma penelitian kualitatif sering dikaitkan dengan penelitian deskriptif analitis, komparatif, yang berfokus pada makna, di mana data dapat dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen. Menurut pandangan dunia ini, realitas adalah apa yang diciptakan atau dibentuk oleh orang itu sendiri.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut kelebihan dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) akan dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari studi ini dengan cara yang sesuai dengan kewajiban peraturan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini harus memperdalam pengetahuan kita tentang topik dan memberikan sebagai sumber berharga untuk penyelidikan lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintahan Desa beji

Pemerintah Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat menggunakan hasil penelitian sebagai informasi dan masukan sekaligus memanfaatkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Rahmadani Ilham. 2018. *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbia Jaya*.
- Ahar Susanto. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian pendidikan: Metode dan paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewanti. (2015). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Hendrawati, L. (2021). *Efektifitas penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek*.
- ILHAM, A. R. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pengelolaan Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Indrianti, R. (2020). *Efektifitas penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat kecamatan pengaron (Doctoral dissertation, Universitas Islama Kalimantan MAB)*.
- Ismail, Muhamad, dkk. 2016. *Sistem Akuntansi pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Volume XIX No. 2 ISSN 1979-6471. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Iswahyudi, A., & Triyuwono, I. (2017). *Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, transparansi, Partisipasi, Value Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupate Lumajang)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi.
- Maharani, D.N., & Akbar, F. S. (2020). *Penerapan Sisteem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Behavioral Accounting Journal, 3(1), 1-20.
- Manopo, H., & Arie, F. V. 2016. *Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia Periode 2011-2014*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Mardaw Mutiara, M. Cholid Mawardi dan Siti Aminah Anwar. 2022. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa*, E-RA, Vol.11, 40-41.
- Meleong. Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mooduto, W. I. S. (2013). *Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Kabila*. Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA), 1(1), 27-34.
- Mustofa. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. ISSN 2252- 6765.
- Novitassari, A. D., & Harsasto, P. (2019). *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran dana Desa*. Journal of Politic and Government Studies, 9(01), 121-130.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Desa.
- Ramendra, I. (2020). *Evaluasi Penerapan Good Governance Pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Anggaran (Studi Kasus Pandangbuli)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Risnaningsih, S Tanuwijaya, NI Iriani. (2018). *Improving Transparency and accountability of MSME Financial Statements By Using Accrual Method*. MIEC-J (Management and Economics Journal) 2(2), 149-154.
- Risnaningsih. (2017). *Pengelolaan Keungan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept*. Jurnal Akuntansi Perpajakan 1(1).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. A. (2018). *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi Undiksha, 8(2).
- Mustofa, Anies I. 2012. *Pengaruh penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Accounting Analisis Journal . ISSN 2252-6765. Universita Negeri Semarang.